

ARSIP DINAMIS DALAM KERANGKA *WHOLE OF GOVERNMENT* DI PERGURUAN TINGGI

Agus Sediadi Tamtanus

Widyaiswara Madya, Pusat Pendidikan Dan Pelatihan,
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
agus@ristekdikti.go.id

Recieved: April 12 2019; Revised: May 17 2019; Accepted: May 23 2019

Abstract: One of the Agenda 3 subject material, for participant in basic training of civil servant candidates (CPNS) Group III is *Whole of Government (WoG)*. These CPNS are prospective young lecturers at various universities in Indonesia. The presence of *WoG* training subject, it is hoped that the prospective young lecturers can quickly actualize the concepts and implementation of *WoG* concepts in higher education in a policy perspective in Indonesia. Problems faced by Indonesia universities is the website ranking is still low based on *Webometrics*. The development of a website must have sufficient insight into the concept of *Dynamic Archives*, the concept of *e-Government* and the concept of *WoG* that are interrelated and have an impact. It is because of universities have vision and mission to become *World Class University (WCU)*, and one of efforts to reach that by increasing the international ranking in *Webometrics*.

Keyword: *Dynamic archive, Webometric, e-Government, WoG.*

Abstrak: Salah satu materi Agenda 3 untuk peserta pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil (CPNS) Golongan III adalah *Whole of Government (WoG)*. CPNS ini adalah calon dosen muda di berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Adanya mata pelatihan *WoG*, sangat diharapkan para calon dosen muda ini dapat cepat mengaktualisasikan konsep dan implementasi konsep *WoG* di perguruan tinggi dalam perspektif kebijakan di Indonesia. Masalah yang dihadapi perguruan tinggi di Indonesia, masih rendah ranking website berdasarkan *Webometrics* yang ada. Pengembangan suatu website harus mempunyai wawasan yang cukup baik tentang konsep arsip dinamis (*Dynamic Archives*), konsep *e-Government* dan konsep *WoG* yang saling berkaitan dan berdampak. Hal ini harus dipahami oleh civitas akademika di perguruan tinggi yang saat ini banyak perguruan tinggi mempunyai visi dan misi bisa menjadi *World Class University (WCU)*, salah satunya dengan meningkatkan ranking internasional di *Webometrics*.

Kata Kunci: *Arsip Dinamis, Webomatrik, e-Government, Whole of Government.*

Pendahuluan

Pemerintah Republik Indonesia, baik di kelembagaan pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah, saat ini sedang berusaha keras meningkatkan

elayanan publik sebaik dan secepat mungkin. Hal itu dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing. Salah satu indikator adanya standard layanan publik

yang baik di era melenial seperti saat ini adalah tersedianya situs (*website*) secara umum yang dinamis dari masing-masing lembaga pemerintahan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) saat ini sangat pesat, dimana ketersediaan sebuah situs suatu lembaga menjadi komponen penting dalam proses pengembangan e- Government.

Pemanfaatan TIK dapat dirasakan secara maksimal dan optimal apabila dalam proses pengaksesan, serta proses manajemen data dan informasi sudah terintegrasi dengan baik.

Sementara itu, di perguruan tinggi ketersediaan akan adanya *website* dapat menentukan kualitas perguruan tinggi tersebut. Di dunia internasional ada istilah yang disebut dengan *Webometric*, yaitu perangkian *website* perguruan tinggi yang dilakukan secara global. Pemerintah terus mendorong perguruan tinggi di Indonesia untuk dapat menjadi bagian dari Universitas Kelas Dunia (*World Class University*), salah satunya dengan terus mengupayakan peningkatan program peringkatnya di *Webometrics*.

Disisi lain, dengan adanya *webometrics* ini adalah untuk memotivasi lembaga dan akademisi memiliki web yang mencerminkan aktivitas mereka secara akurat. *Webometrics Ranking of Web Universities* menilai volume dan kualitas konten situs web sebagai dasar pemeringkatan. Selain itu terdapat beberapa Indikator pendukung web yang masih saja dianggap sebagai proksi dalam mengavaluasi kinerja perguruan tinggi global yang benar, komprehensif dan mendalam, dengan melihat kegiatan dan hasilnya termasuk relevansi dan dampaknya.

Masalah volume dan kualitas konten di web perguruan tinggi di Indonesia masih kurang diperhatikan, seperti jumlah laman dan jumlah file (*PDF, Word, Power Point, dan Post Script*) pada *website*. Hal ini terjadi dikarenakan masih

kurangnya pengelolaan arsip (*archive management*), khususnya arsip dinamis (*dynamic archive*) dengan baik karena masih menumpuknya file dalam bentuk cetak (*hard copy*). Kualitas konten, dapat dilihat dari beberapa komponen, seperti ketersediaan hasil: (1) Penelitian (jurnal, konferensi, repository); (2) Pendidikan (pendidikan jarak jauh); dan (3) Pengabdian (sosial, budaya dan lingkungan). Disisi lain, masih rendahnya reputasi *Webometrics* perguruan tinggi di Indonesia karena ketersediaan jumlah dan publikasi artikel ilmiah pada jurnal dan prosiding berskala internasional.

Secara umum, kendala utama baik di pemerintahan dan lingkungan perguruan tinggi adalah masih tingginya siloisasi antar satuan kerjanya, dan masih tingginya ego sektoral sehingga pelayanan publik/masyarakat masih dirasakan kurang memadai dibeberapa sektoral. Untuk itu, perlu pengenalan yang masif adanya paradigma *Whole of Government (WoG)*, khususnya di perguruan tinggi sehingga seluruh civitas akademika dapat mengimplementasikan untuk setidaknya dapat mendorong serta meningkatkan ranking *Webometrics* secara global.

Implementasi atau praktek *WoG* di berbagai lembaga/institusi, yaitu perlunya penyatuan seluruh sektor yang berkaitan dengan pelayanan publik. Penyatuan ini berdasarkan nilai-nilai dasar, sebagai berikut: (1) Koordinasi. Hal ini sangat penting karena dengan adanya kompleksitas di suatu lembaga/institusi maka sangat diperlukan koordinasi yang efektif dan efisien untuk menjalankan kegiatan kelembagaan; (2) Integrasi. Integrasi dapat dilakukan melalui pembauran sistem antar lembaga negara yang ada sehingga nantinya mampu menjadi kesatuan yang integral; (3) Singkronisasi. Singkronisasi atau penyelarasan merupakan bentuk upaya

penyelarasan semua kegiatan data dan informasi yang berasal dari berbagai sumber sehingga diharapkan nantinya dapat sinkron dengan baik; (4) Simplifikasi. Simplifikasi merupakan penyederhanaan segala sesuatu baik terkait data/proses disuatu lembaga untuk mengefisienkan waktu, tenaga dan biaya.

Meningkatkan performa suatu website, perlu adanya wawasan yang cukup tentang konsep data dan informasi (data & information), konsep arsip dinamis (*dynamic archives*) dan konsep e-Government yang tentu saling berkaitan. Secara umum, pengaksesan informasi tidak bermasalah, tetapi terdapat masalah yang cukup rumit yakni masalah pengelolaan dan pendayagunaan informasi.

Masa sekarang adalah masa dimana masyarakat kebanjiran informasi, namun kendalanya sering adanya informasi menjadi berita palsu (berita *Hoax*). Selain itu, data sering disebut sebagai bahan mentah informasi tetapi tidak dikelola dengan baik. Manajemen data dan informasi yang baik akan menjadi referensi yang akurat dalam pengambilan keputusan pada saat ini ataupun di masa mendatang (*Cambridge International Examinations, 2015*).

Metode

Tulisan ini menggunakan metode penelitian analisis pustaka tentang perlunya implementasi nilai-nilai dasar paradigma *Whole of Governement* untuk diimplementasikan pada perguruan tinggi yang diharapkan mampu memberikan peningkatan ranking Webometrics. Ketersediaan website di perguruan tinggi, diharapkan tidak hanya mampu melayani publik, tetapi menjadi website yang sesuai dengan dasar Pancasila (transparan, jujur, bertanggung jawab dan tertib), menjadi pengetahuan

(*knowledge*) yang sangat penting bagi untuk meningkatkan daya saing bangsa.

Hasil dan Diskusi Budaya Data, Informasi Dan Arsip Dinamis

Adanya indikasi carut marutnya data dan informasi yang dikeluarkan oleh pemerintah, membuat masyarakat Indonesia cenderung membuat tidak mempercayai pemerintah dan cenderung telah kehilangan rasa kepercayaan tersebut. Hal itu juga sangat berdampak kepada masyarakat yang tentunya tidak bertambah pengetahuan dan cenderung mudah terpedaya yang akhirnya menjadikan masyarakat dalam kondisi gagap informasi. Keadaan data dan informasi yang simpang siur dan tidak benar akan sangat mempengaruhi proses pembuatan kebijakan yang sangat memungkinkan terjadinya ketidaktepatan sasaran, sehingga adanya istilah "*Kesimpangsiuran*" karena data dan informasi yang digunakan tidak akurat dan valid. Untuk itu, ditunjuk Badan Pusat Statistik untuk mengelola data dan informasi namun nampaknya kebijakan tersebut belum berjalan secara efektif (Koran Sindo,2018)

Keadaan data yang masih simpang siur terindikasi dari adanya beberapa kasus, seperti contoh ini. Data dan informasi stok beras sehingga keluar kebijakan adanya import beras untuk mempertahankan pangan nasional. Hal lain yang terjadi, yaitu kurangnya sosialisasi penggunaan e-FIN untuk pembayaran pajak sehingga terjadi kegagalan masyarakat Tangerang dalam menggunakannya (Tribun Jakarta,2018) Masyarakat modern seharusnya dapat memanfaatkan dan menggunakan data dan informasi yang valid dan terbarukan dalam mendorong berbagai aspek pembangunan. Seperti yang kita ketahui, pada dasarnya proses *input* dan *ouput* data dan informasi merupakan suatu proses yang menggunakan metode

pemerintahan, sehingga diharapkan terjadi peningkatan layanan masyarakat (*public services*) yang cepat, mudah dan murah di Indonesia (Instruksi Presiden, 2003) E- Government yang baik, efektif dan efisien dalam tata kelolanya, harus mempunyai beberapa komponen penting, yaitu tersedianya:

- (1) Ketersediaan layanan aksesibilitas (*Accessability*), seperti adanya jaringan telekomunikasi dan internet yang cepat, murah dan mudah sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengakses portal dalam layanan masyarakat tersebut;
- (2) Ketersediaan berbagai situs layanan publik (*Publik Service Portal*) yang terintegrasi data dan informasi di instansi terkait;
- (3) Kesiapan adanya organisasi admin (*Information Management and Processing Organization*) untuk pengelola situs-situs tersebut sebagai pendukung (*back office*) baik data dan informasinya.
- (4) Kesiapan sarana dan prasarana baik infrastruktur dan aplikasinya atau (*Infrastructure and Basic Application*) yang mudah bagi masyarakat secara umum dan khususnya bagi pengelola untuk dapat mendukung secara maksimal berjalannya layanan di masyarakat.

Adanya berbagai komponen di atas tersebut, masih memerlukan adanya berbagai dukungan lain yang harus diperhatikan, seperti adanya kebijakan, manajemen dan hukum (Mirmani, 2014).

Apa itu e-Government

Menurut Ginman (1988) dalam (Wei Choo, *et.al* 2008), terbentuknya suatu budaya informasi karena adanya transformasi dari sumberdaya intelektual yang dikelola secara sinergis dengan transformasi sumberdaya material. Indikator yang dapat mengenali terjadinya proses transformasi nilai-nilai

informasi di suatu organisasi, yaitu: (1) Apakah aktivitas informasi di organisasi mampu dibedakan berdasarkan keunikan, sehingga tercermin akan adanya budaya informasi, sebagai karakter mereka? (2) Apakah timbul dampak luaran dalam penggunaan informasi secara signifikan? Masyarakat informasi (*information society*) baik langsung ataupun tidak langsung akan mendorong percepatan proses e- Government.

Hasil penelitian Herawati (2014), masalah sumber daya manusia yang berkompeten dalam penggunaan TIK masih rendah, khususnya di pemerintahan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Kondisi sumber daya manusia di suatu lembaga sangat vital dalam mengelola keberhasilan lembaga tersebut. Mereka dituntut untuk cepat mengadaptasi adanya perubahan lingkungan dan merubah pikirannya untuk lebih kreatif dan inovatif. Penerapan e-Government saat ini sudah menjadi kebutuhan dan keharusan dalam suatu organisasi publik untuk meningkatkan pelayanan dan mendorong peningkatan daya saing di era globalisasi saat ini.

Pemerintah Indonesia dalam menerapkan e-Government belum berjalan secara maksimal, hal ini karena kompetensi TIK dari sumber daya manusianya, kondisi infrastruktur saat ini belum merata dengan baik, dan ketersediaan data penerapan e-Pemerintah belum lengkap (Amin, 2016). Pengalaman dari Uni Eropa, mereka mengembangkan Pedoman Komunal untuk semua anggotanya, dimana mereka harus mampu memperlakukan warga negara dan sektor bisnisnya secara sama, mengembangkan dan mendefinisikan gerbang yang diharapkan dapat saling berinteraksi dan diharapkan pada pelaksanaan nantinya mampu mengimplementasikan gateway ini agar secara mandiri akan menjadi tanggung

jawab sepenuhnya dari Komisi Eropa (PEGS, 2017).

Implementasi e-Government saat ini di Indonesia belum maksimal, karena sarana dan prasarana belum merata, sehingga pemerintah menetapkan Direktorat e-Pemerintah, Direktur Jenderal Aptika-Kementerian Komunikasi, dan Informasi RI, bertugas membantu mendorong penguatan Tata Kelola TI diseluruh daerah. Masalah tata kelola TI (*management & governance*) ini mencakup program perencanaan, pembangunan, pengembangan, monitoring dan evaluasi sistem TIK, sehingga e-Government yang dibangun belum mencapai sasaran, tidak efektif dan efisien. Untuk itu diperlukan adanya upaya keras untuk mendorong koordinasi dan kerjasama diantara pemerintah pusat dan daerah (Peraturan, 2017)

Upaya pemerintah yang dimaksudkan untuk meningkatkan pemanfaatan e-Pemerintah di Indonesia melalui program pemerinkatan e-Government Indonesia, yang disingkat (PeGI), dimana beberapa kriteria sebagai penilaiannya, yaitu: (1) terdapat berbagai acuan (*blue-print*) pengembangan dan pemanfatan TIK; (2) adanya proses evaluasi (*monitoring & evaluation*) secara menyeluruh dalam pengembangan dan pemanfaatan TIK; dan (3) adanya peta jalan (*road-map*) pengembangan dan pemanfaatan TIK secara nasional.

Menurut Masyhur (2017), ranking e-Pemerintahan Indonesia masih rendah di Kawasan Asia Tenggara. Hal ini, dipaparkan juga oleh PBB (UN), dimana ranking terbaik Indonesia pada tahun 2005 di posisi ke 96, sementara itu data pada tahun 2014 beberapa negara ASEAN mengalami peningkatan posisi, Thailand di posisi ke 77, Vietnam meningkat posisi ke 89, dan Filiphina meningkat di posisi ke 71. Rendahnya posisi e-Government Indonesia, memberikan gambaran masih rendahnya kualitas pelayanan publik diberbagai sektor.

Menurut Sakowicz (2003), proses evaluasi yang benar dari e-Government harus fokus pada 4 unsur, yaitu adanya unsur e-layanan, unsur e-manajemen, unsur e-demokrasi serta terdapat unsur *e-commerce*. Saat ini, masih banyak situs e-Government yang belum sesuai, dimana masih banyak tidak memenuhi ke empat unsur tersebut dan pengembangannya tidak berbasis teknologi kekinian dan lebih banyak pada kebutuhan aktual pengguna, sehingga penggunaan teknologi internet tidak efektif. Untuk itu, perlunya e-Government appraisal harus dapat menjelaskan bagaimana jika seharusnya orang menggunakan internet tidak hanya untuk tugas-tugas pribadi mereka tetapi juga sebagai sarana untuk melibatkan mereka dalam urusan publik.

Kearsipan dapat digunakan untuk membantu pemerintah dalam mencapai berbagai tujuan kebijakan utamanya, khususnya meningkatkan peran e-Pemerintah di instansi pemerintah. Menurut (Tribun, 2018), ada tiga tujuan utama kegiatan kearsipan, yaitu memilah dan memilih catatan yang paling penting untuk keamanan jangka panjang; menyimpan dengan aman dan dikelola dengan baik, dapat diakses oleh setiap orang. Ada 7 (tujuh) tujuan kegiatan arsip dapat berkontribusi dengan baik dalam kebijakan pemerintah yang sangat penting, yaitu:

1. **Publik Akses** (*Public Access*), ketersediaan dan kesiapan akses bagi semua warga negara ke sumber-sumber primer yang unik dan tak tergantikan di mana banyak gudang pengetahuan dan informasi dunia berada;
2. **Modernisasi Layanan Publik** (*Modernisation of Public Services*): keberhasilan e-Pemerintah sangat tergantung pada kemampuan kita untuk mengelola, menyimpan, dan mengambil catatan digital. Otoritas publik harus memberikan layanan berkualitas tinggi, dimana warga

memiliki hak untuk mengharapkan dan bekerja sama secara efektif satu sama lain di era informasi, maka mereka harus memastikan bahwa sistem informasi mereka kompatibel dan bahwa transaksi bisnis dicatat dengan aman;

3. **Pemerintah Yang Terbuka dan Bertanggung Jawab** (*Open and Accountable Government*): mendorong keterbukaan, sehingga menetapkan hak akses warga negara ke catatan resmi, sesuai adanya kebebasan informasi, perlindungan data akan semakin bergantung pada pengelolaan catatan yang efektif. Ini mencakup pembuatan catatan dan pengaturan yang dapat diandalkan untuk pengambilan kebijakan cepat ketika diminta;
4. **Pendidikan** (*Education*): arsip dapat menyediakan materi-materi untuk anak-anak sekolah, siswa dan '*pembelajar seumur hidup*', seperti arsip sejarah untuk dapat membuat informasi kunci yang relevan dengan kurikulum nasional dan pembelajaran mandiri tersedia melalui partisipasi mereka dalam Jaringan Nasional untuk Pembelajaran dan jaringan lainnya;
5. **Inklusi Sosial** (*Social Inclusion*): adanya layanan untuk semua warga negara, arsip dapat membantu menjembatani kesenjangan antara mereka yang mampu mengakses informasi dan mereka yang sebaliknya tidak bisa;
6. **Regenerasi Ekonomi** (*Economic Regeneration*): arsip menyediakan informasi yang berpotensi bernilai tinggi untuk memajukan bisnis dan diharapkan nantinya dapat membantu mempromosikan tujuan ekonomi utama Pemerintah. Secara khusus, digitalisasi progresif koleksi arsip akan ideal untuk membuat mereka mudah. Menghitung jumlah file dalam bentuk pdf, ps, doc dan format ppt, dengan kode (R) (12,5 %);

diakses oleh industri kreatif yang beroperasi di sektor budaya. Juga, repositori arsip dapat meningkatkan pariwisata dengan menarik pengunjung dari jauh yang ingin berkonsultasi dengan sumber informasi unik mereka;

7. **Regionalisme** (*Regionalism*): kebijakan pemerintah adalah untuk mendorong pembentukan pengelompokan regional yang lebih kuat, untuk sektor budaya seperti yang lain. Banyak koleksi arsip dan sumber daya yang sangat baik dikelola di sektor publik di tingkat lokal dan regional dan sangat penting bahwa ini diberikan kesempatan terbaik untuk berkontribusi pada tujuan kebijakan.

Lebih lanjut, bagaimana akses layanan di perguruan tinggi? Bagaimana cara memperingkat situs/web di perguruan tinggi? Saat ini di masyarakat, khususnya masyarakat ilmiah mencari informasi ilmiah menggunakan internet, sehingga pengembangan suatu institusi akademik memanfaatkan pengembangan web secara maksimal menjadi suatu etalase utama di suatu universitas. Eksistensi suatu perguruan tinggi yang baik dapat dilihat di ranking webnya, karena keberadaan suatu web menjadi salah satu sumber utama informasi dan pameran utama untuk semua orang yang diakui di 'dunia nyata'. Web berperan sangat penting sebagai alat komunikasi ilmiah dan budaya bahkan menjadi cerminan dari kinerja suatu perguruan tinggi.

- Menurut Aguillo (2008), saat ini pengembangan indikator web menjadi alat memperingkat universitas, dimana menggunakan beberapa indikator gabungan yang disebut "WR", terdiri dari:
- 1) Menghitung jumlah halaman yang diterbitkan, dengan kode (S) (25%);
 - 2) Menghitung jumlah artikel yang dikumpulkan dari Database Google Cendekia (Sc) (12,5 %)

- 3) Menghitung jumlah file dalam bentuk pdf, ps, doc dan format ppt, dengan kode (R) (15,5 %);
- 4) Menghitung jumlah total tautan eksternal, dengan kode (V) (50%).

Dengan demikian pengukuran di atas, masih menunjukkan adanya kesenjangan digital akademik antara pendidikan tinggi di Amerika Serikat dan yang ada di Uni Eropa, sehingga menggunakan indikator pengukuran web untuk mengukur kinerja universitas sehubungan dengan indikator akademik yang lebih tradisional.

Pemerikatan tersebut, dilaksanakan oleh lembaga yang melakukan penelitian ilmiah secara independen, obyektif, bebas, informasi andal, multidimensi, terbarukan dan terbuka melalui situs ini: <http://www.webometrics.info/en>. Contoh ranking Webometrics perguruan tinggi di Indonesia pada tahun 2019, tabel 1. Sementara itu, melalui <http://4ICU.org/id>, pengukuran hanya pada parameter kecepatan online web perguruan tinggi, sehingga tidak ada 'lebih baik' atau 'lebih buruk' secara keseluruhan diperguruan tinggi saat ini.

Tabel 1. 10 Ranking Perguruan Tinggi Versi Webometrics Tahun 2019

No.	Universitas	Ranking Dunia
1	Universitas Gadjah Mada	845
2	Universitas Indonesia	856
3	Institut Teknologi Bandung	1132
4	Institut Petanian Bogor	1288
5	Universitas Diponegoro	1371
6	Universitas Brawijaya	1524
7	Institut Teknologi Sepuluh November	1543
8	Universitas Sebelas Maret	1678
9	Universitas Syiah Kuala	1704
10	Universitas Padjadjaran Bandung	1823

Sumber: <http://www.webometrics.info/en/Asia/Indonesia>%20.

Adanya peningkatan persaingan global mendorong perguruan tinggi dan pemerintahan mampu ikut bersaing dikancah dunia melalui tampilan masing-masing websitenya. Sementara itu, banyak pemerintahan dan perguruan tinggi pada level rendah di infrastruktur dan sumber daya manusia sehingga terjadi adanya kesenjangan digital. Ada kecenderungan, dimana ranking Webometrics perguruan tinggi di suatu tempat sangat baik akan berkaitan dengan kondisi e-Government pemerintah di tempat tersebut, karena sumber daya manusia yang mengelola paham akan pentingnya digitalisasi. Website perguruan tinggi dan pemerintah

menggunakan teknologi digital khususnya internet untuk mencapai perguruan tinggi dan pemerintahan yang lebih baik, dimana keduanya ingin meningkatkan layanan administrasinya. Contoh, pelaksanaa program e-Government di Jogjakarta lebih kurang sejak 10 tahun yang lalu, dimana dalam program e-Government yang telah dijalankan dengan basis strategis pemanfaatan TI, keterlibatan publik dalam pengambilan keputusan, serta sistem administrasi kependudukan dan sistem administrasi perizinan. Di Jogjakarta, mempunyai petahana yakni Universitas Gadjah Mada yang ranking Webometricsnya di Indonesia tahun 2019

tertinggi. Sementara itu, pada tahun 2016, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) menyebut bahwa DIY secara umum akan dijadikan percontohan di tingkat nasional.

Pada prinsipnya, website di perguruan tinggi dan pemerintah harus dapat saling berkomunikasi, melalui proses perubahan inovatif internal dalam memberikan layanan di masing-masing Lembaga untuk memperoleh informasi dan data yang valid.

Whole of Government

Saat ini tuntutan transformasi devolusi struktural, disagregasi, dan adanya organisasi tunggal agar lebih terintegrasi dalam meningkatkan pelayanan publik berlangsung cukup cepat. Hal ini sejalan dengan adanya isu percepatan terbentuknya pemerintahan terbuka (*Open Government Plan*), yang lebih terbuka, meningkatkan partisipasi publik dan memperkuat demokrasi bangsa. Para arsiparis sangat mendukung terwujudnya pemerintahan terbuka tersebut, karena arsiparis bekerja berdasarkan konsep lebih terbuka melalui transparansi, partisipasi, dan kolaborasi yang lebih luas (NARA, 2014). Pengembangan konsep adanya "Pemerintahan Satu Atap", merupakan upaya memecahkan terjadinya kondisi silo terisolasi dalam manajemen pemerintahan ini menjadi tuntutan dan tren global yang didorong oleh berbagai kekuatan masyarakat seperti semakin kompleksnya masalah yang menuntut tanggapan kolaboratif, meningkatnya permintaan dari warga negara untuk layanan publik yang lebih personal dan dapat diakses, yang direncanakan, diimplementasikan dan dievaluasi dengan partisipasi mereka, dan peluang yang disajikan oleh internet untuk mengubah cara pemerintah bekerja untuk rakyat (UN, 2012).

Adanya Revolusi Industri 4.0, pemerintah Indonesia dengan cepat

mengantisipasi perubahan tersebut, khususnya dalam melakukan manajemen di perguruan tinggi yang saat ini dirasakan bergerak ditempat. Paradigma civitas akademika di perguruan tinggi harus melakukan tugasnya sebagai pelayan publik (*public services*), dimana pemangku kepentingannya (*stakeholder*) adalah para mahasiswa menjadi sangat penting. Sementara ini, pemerintah terus mendorong berbagai perguruan tinggi di Indonesia untuk menuju kualitas kelas dunia (*World Class University*) dengan mengacu berbagai standard internasional (Dipojono, 2015). Implementasi menuju WCU sudah banyak menjadi target perguruan tinggi saat ini, tetapi dalam prosesnya masih banyak kendala yang dihadapi, antara lain: (1) Akreditasi prodi yang belum mencapai status A; dan (2) Pendanaan (Iskandar, 2017). Lebih lanjut, untuk mempercepat perguruan tinggi di Indonesia menjadi WCU, harus ada upaya yang signifikan dan berkesinambungan dalam meningkatkan kompetensi aktivitas akademika di setiap perguruan tinggi, baik para dosen dan tenaga pendidik.

Bagaimana meningkatkan layanan publik di perguruan tinggi! Perubahan pola pikir (*mind set*) civitas akademika menjadi upaya mendasar yang harus ditanamkan sejak awal dalam proses pembelajaran di kampus, khususnya bagi para dosen dan calon dosen muda. Calon dosen muda, saat ini dikategorikan sebagai Aparatur Sipil Negara dimana mereka diwajibkan mengikuti Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Latsar CPNS) (Peraturan, 2016) merupakan upaya pemerintah meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di perguruan tinggi, khususnya para dosen muda. Materi Latsar CPNS pada Agenda 1, yaitu: Wawasan Kebangsaan dan Nilai-Nilai Bela Negara; Agenda 2, yaitu: ANEKA (Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika, Komitmen Mutu dan Anti Korupsi), dan Agenda 3, yaitu: Manajemen ASN,

Pelayanan Publik; dan *Whole of Government* (WoG). Secara integrasi, materi Agenda 1, 2 dan 3 diberikan kepeserta pelatihan dengan harapan dapat meningkatkan dan membangun integritas moral, kejujuran, nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang masing-masing peserta. Sementara itu, mata pelatihan WoG, diharapkan para peserta mendapatkan wawasan yang baik akan proses implementasi dan melihat praktek terbaik (*best practice*) dari WoG di pemerintahan, seperti keterkaitan kearsipan, e- Government sampai pelayanan masyarakat.

Menurut Ojo (2012), pendekatan Whole of Government (WoG) merupakan upaya kelembagaan/institusi layanan publik yang bekerja lintas batas portofolio untuk mencapai tujuan bersama dan adanya respon pemerintah secara terpadu untuk isu-isu tertentu, dimana: (1) WoG, dapat fokus mengembangkan kebijakan, program manajemen, dan penyampaian layanan; (2) WoG, dapat diterapkan secara luas, komprehensif, spesifik, dan sesuai target; dan (3) WoG dapat bersifat informal atau formal sesuai perjanjian.

Permasalahan saat ini, masih rendahnya daya saing Indonesia di dunia, hal ini terkait dengan indikator inovasi yang masih berada di bawah Singapura dan Malaysia. Faktor penentu inovasi, salah satunya adalah kolaborasi riset universitas dengan industry, hal ini menguatnya beberapa indikasi adanya kekurangan secara organisasi di lingkungan universitas, yaitu: (1) Belum terjadi budaya riset yang dibutuhkan oleh industri (*link and match*), sehingga untuk mengurangi "GAP" tersebut, diperlukan kompetensi seorang dosen yang berkualifikasi mampu melakukan riset dengan baik sesuai kebutuhan pasar; (2) Belum adanya koordinasi lintas

sektor, sehingga hasil penelitian belum maksimal, ini ini memberikan indikasi kinerja peneliti belum efisien dan efektif sesuai sasaran kerjanya. Untuk itu, perlunya pembekalan pengetahuan akan sistem pengelolaan pemerintahan terintegrasi melalui WoG, seperti bentuk pelayanan, implementasi, dan perspektif kebijakan di Indonesia, khususnya di perguruan tinggi sehingga peserta dapat memahami implementasi WoG dalam perspektif kebijakan, sesuai salah satu indikator hasil belajar (LAN, 2017). Secara umum, konsep WoG belum terimplementasikan di perguruan tinggi di Indonesia. Beberapa permasalahan yang masih menjadi kendala, yaitu belum terintegrasinya data dan informasi pengembangan Iptek Nasional antar perguruan tinggi sehingga terjadi kesulitan untuk pengembangan penelitian yang sinergis secara nasional.(De Brí & Bannister, 2010).

Permasalahan Iptek Nasional, sudah teridentifikasi sejak Tahun 2007, antara lain: (1) Perlunya pengembangan dan penyempurnaan teknolog, (2) Peningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya iptek, (3) Peningkatkan daya guna hasil-hasil penelitian diberbagai bidang pembangunan, dan (4) Pembentukan iklim yang kondusif bagi pengembangan sumberdaya litbang. Untuk dapat menjawab masalah tersebut diatas, sangat diperlukan adanya data dan informasi yang akurat dan baik. Masyarakat Iptek, mengalami kesulitan dalam pengambilan data dan informasi, khususnya di sektor industri, UKM dan multinasional. Adanya indikator Iptek nasional, dapat: (1) Memetakan, mengukur dan membandingkan kondisi iptek dengan negara lain; (2) Mengevaluasi kinerja iptek; dan 3) Merencanakan pengembangan iptek ke depan.

Saat ini masih dirasakan lemahnya sinergi dan koordinasi kebijakan iptek antar perguruan tinggi, sehingga sulit

mengetahui kemajuan iptek dari masing-masing perguruan tinggi. Upaya kolaborasi harus ditingkatkan, sehingga tidak adanya tumpang tindih hasil penelitian karena terjadinya data dan informasi iptek yang tidak akurat dan valid. Upaya BPS untuk sinergi dengan ketersediaan data dan informasi Iptek, sudah terlihat di Panduan Sensus Ekonomi 2016 (Kompas, 2016). Adanya data dan informasi penggunaan teknologi, akan dapat memetakan kondisi iptek nasional, khususnya di lingkungan perguruan tinggi. Apakah teknologi yang digunakan teknologi import, lisensi atau teknologi anak bangsa, ini akan menjadi acuan untuk meningkatkan penelitian yang sesuai dengan kebutuhan sehingga mampu mendongkrak kesejahteraan rakyat, khusus bidang pangan, kesehatan, energi, pertahanan, transportasi, serta informasi dan telekomunikasi. Indikator Iptek nasional adalah suatu analisis statistik yang ditujukan untuk menggambarkan keadaan dan perkembangan kemampuan Iptek di suatu negara. Pada umumnya indikator Iptek dapat digunakan untuk meningkatkan pemahaman para pengambil keputusan tentang berbagai kondisi yang perlu ditangani. Oleh karena itu, penyusunan indikator Iptek nasional perlu dilandaskan pada pemahaman tentang berbagai mekanisme dan faktor-

faktor yang melandasi perkembangan kemampuan iptek nasional.

Harapan terselenggaranya Sensus Ekonomi 2016, BPS dapat terus mendorong ketersediaan data dan informasi Iptek yang terstruktur, sistematis dan masif (TSM), sehingga akan meningkatkan dan mempercepat terjadinya daya saing bangsa yang mandiri. RPJM Tahap Ke 3, masalah sumberdaya (SDA), sumberdaya manusia (SDM) dengan keunggulan iptek. Menurut (OECD,2016), tujuan akhir atau tahap dalam jalur transformasi digital adalah "Pemerintahan Digital", yang mampu memungkinkan pemerintah untuk menciptakan peningkatan nilai publik dan modernisasi sektor publik yang luas (dengan keterbukaan, transparansi, keterlibatan dan kepercayaan yang lebih besar dalam pemerintahan) melalui integrasi teknologi digital dan pengguna preferensi dalam desain layanan dan pengiriman layanan pribadi langsung dan dalam membentuk hasil kebijakan publik, sementara juga mencapai efisiensi dan peningkatan produktivitas.

Tujuan Kebijakan Layanan Digital Untuk kesejahteraan Masyarakat: Efisiensi, Efektivitas, dan Tata Kelola yang Baik, dimana ada beberapa fokus yang harus diperhatikan, seperti efisiensi, efektifitas, Pemerintahan yang baik, perhatikan Gambar 1.

Gambar 1. Kebijakan Kesejahteraan Digital



(Sumber : OECD, inspirasi dari Masyarakat Eropa, 2013).

Sementara itu OECD menjelaskan beberapa unsur. terjadinya transformasi

digital, seperti terlihat di Tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2.
Unsur-unsur Transformasi Digital (OECD, 2016)

Teknologi Informasi & Komunikasi			
Perubahan Arah	<i>Digitalisasi</i>	<i>e-Pemerintah</i>	<i>Pemerintahan Digital</i>
	Penggunaan teknologi digital yang lebih besar untuk meningkatkan aktivitas lintas pemerintahan dan pengelolaan data / informasi	Pemerintah menggunakan teknologi digital khususnya internet untuk mencapai pemerintahan yang lebih baik	Teknologi digital dan preferensi pengguna terintegrasi dalam desain dan penerimaan layanan dan reformasi sektor publik yang luas - bagian integral dari strategi modernisasi pemerintah untuk menciptakan nilai publik
	Fokus pada efisiensi dan produktivitas	Meskipun fokus pada: efisiensi dan produktivitas tetapi tetap memberikan layanan yang disesuaikan kepada perorangan	Fokus pada tata kelola, keterbukaan, transparansi, keterlibatan dengan dan kepercayaan pada pemerintah serta efisiensi dan produktivitas
	Pemerintahan terpusat pemerintah adalah penerima layanan pasif	Meskipun pengguna/ warga terpusat tetap berpartisipasi dalam proses pemberian layanan	Masyarakat - didorong - pengguna menyuarkan tuntutan dan kebutuhan mereka, berkontribusi untuk membentuk agenda dan melihat konten dan pengiriman
Pelayanan Masyarakat			
Layanan administrasi fungsi inti internal pemerintah merupakan kegiatan internal di lembaga yang secara langsung mendukung penyampaian layanan	Meningkatkan proses internal pemerintah Meningkatkan proses internal yang mendukung pengiriman layanan pribadi langsung, untuk meningkatkan layanan	Proses perubahan inovatif internal Inovasi dalam pemberian layanan di margin	Mengubah proses internal Mengubah desain proses pengiriman dan layanan
Layanan pribadi langsung oleh pemerintah disediakan untuk mengatasi kesejahteraan pribadi warga dan mendukung hasil kebijakan publik	Basis data dan sistem informasi pribadi Standar pelayanan pengiriman Standar pelayan	Integrasi basis data, sistem TI Kolaborasi 24/7 layanan online	Berbagi data: data/kumpulan informasi/analitik data Bergabung dengan administrasi - platform ICT untuk berbagi informasi, layanan dan meningkatkan kolaborasi Layanan inovasi yang disesuaikan dengan kebutuhan individu (m-government)
Transformasi Digital			

Transformasi digital terdiri dari: fungsi unsur TIK dan dan unsur layanan masyarakat. Unsur TIK, mempercepat proses digitalisasi untuk mendorong terjadinya e-Government yang mampu mendasari terbentuknya Pemerintahan Digital. Adanya pemerintahan digital ini, akan merubah proes pelayanan kepada masyarakat, dimana adanya layanan

administrasi (*administration services*) dan layanan pribadi (*personal services*) bagi layanan tata kelola masyarakat.

Selanjutnya, data dan informasi yang ada di perguruan tinggi harus dapat dimanfaatkan secara nasional, sesuai rekodnya yang ada. Berdasarkan pengertian rekod perguruan tinggi dan pengelompokan rekod perguruan tinggi

tersebut di atas dapat diambil kesimpulan bahwa rekod yang terkoleksi di suatu perguruan tinggi dikelompokkan sebagai berikut:

1. Rekod kelembagaan yang terdiri dari (a) rekod administrasi, (b) rekod pegawai, dan (c) rekod sarana dan prasarana pendidikan;
2. Rekod kemahasiswaan yang terdiri dari (a) rekod mahasiswa aktif, (b) rekod mahasiswa alumni, serta. (c) rekod kegiatan kemahasiswaan;
3. Rekod hasil seminar dan penelitian pegawai;
4. Rekod hasil studi yang berupa rekod skripsi/tesis/disertasi;
5. Rekod pengabdian pada masyarakat;
6. Rekod program kelembagaan seperti kerjasama;
7. Rekod keuangan.

Dengan demikian, rekod sebagai hasil samping kegiatan di suatu organisasi harus dikelola dengan baik sehingga apabila sewaktu-waktu dibutuhkan, seperti untuk kegiatan akreditasi dan visitasi, rekod yang dimaksud dapat ditemu balik dengan mudah dan cepat. Kegiatan untuk mengelola rekod dengan tujuan seperti ini dikenal dengan records management atau pengelolaan rekod (Yani, 2014). Berbagai rekod yang ada di masing-masing perguruan tinggi harus dimanfaatkan untuk meningkatkan pelayanan ke masyarakat, dengan memanfaatkan perkembangan TIK saat ini, melalui konsep Transformasi Digital.

Proses pembuatan Rencana Induk Riset Nasional 2017-2045 (RIRN), telah mengimplementasikan WoG, dimana perancangan pada penelitian tersebut serta sudah menggunakan pendekatan holistik, lintas institusi, lintas ranah dan berdasarkan fokus riset. Diharapkan, kedepannya dapat mengakomodasi semua pihak pelaku riset, sinergi dan berdaya hasil optimal (Kemenristekdikti, 2017).

Kesimpulan

Perguruan Tinggi di Indonesia dituntut untuk menjadi *World Class Univerity* (WCU). Salah satu indikator WCU, adalah peringkat (ranking) website masing-masing perguruan tinggi dalam Webometrics. Performa suatu website sangat tergantung dari kompetensi pembuatnya baik tim maupun perorangan. Wawasan seorang pembuat website setidaknya memahami akan pentingnya arsip dinamis (*dynamic archive*); sistem Webometrics; kebijakan e- Government (*e-Government policy*). Lebih lanjut, tim ataupun perorangan pembuat website haru memahami betul konsep *Whole of Government* (WoG), dimana harus mempunyai kemampuan berkonsultasi, berkoordinasi, dan bekerjasama dengan berbagai pihak terkait (*stakeholder*); melayani publik dengan membuka partisipatif, tepat, memudahkan; dan menjalankan manajemen ASN, melaksanakan tugas dengan penuh pengabdian.

Tersedianya website yang baik tidak hanya untuk mencari ranking terbaik di Webometrics tetapi juga harus mempunyai konten yang sesuai dengan dasar Pancasila (transparan, jujur, bertanggung jawab dan tertib), menjadi pengetahuan (*knowledge*) bagi bangsa untuk meningkatkan daya saing bangsa. WoG merupakan *New Paradigm Administration* (NPA) harus diterapkan di seluruh civitas akademika di perguruan tinggi, akan mempercepat meningkatkan ranking webomatrik secara internasional.

Civitas akademika, baik dosen dan tenaga pendidik harus terus di berikan pelatihan untuk mampu meningkatkan kompetensinya, sehingga tidak canggung menghadapi perubahan dan tuntutan yang sangat cepat dalam melakukan pelayanan untuk itu perguruan tinggi harus cepat melakukan proses transformasi digital sebagai peningkatan kualitasnya pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik dan cepat.

Referensi

- Aguillo, I. F. (2008). Webometric Ranking of World Universities : Introduction , Methodology, and Future Developments 'LUI' S Ortega, (902061795). <https://doi.org/10.1080/03797720802254031>
- Amin Muhamad. (2016). *Model Dinamik Penerapan e-Pemerintah Dengan Pendekatan Darcy (Kasus Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Keuangan dan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi UI*. <http://www.ui.ac.id/berita/dinamika-penerapan-e-Pemerintah-di-indonesia.html>.
- Aulia, E. R. (2015). Penggunaan Aplikasi E-Surat SIKD (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis) Dalam Pengelolaan Arsip Elektronik Untuk Mendukung E-Pemerintah Di Badan Arsip Dan Perpustakaan Kota Surabaya. *Jurnal mahasiswa. Unesa. Ac.Id*. <https://jurnal.mahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jpap/article/viewFile/12515/11554>.
- Cambridge International Examinations. (2015). *Data, Information, and Knowledge*. <http://www.cambridge-international.org/images/285017-data-information-and-knowledge.pdf>.
- Damanik, F. N. S. (2012). Menjadi Masyarakat Informasi. *JSM STMIK Mikroskil*, 13(1), 73–84. [http://download.portalgaruda.org/article.php?article=120253&val=5499&title=Menjadi Masyarakat Informasi](http://download.portalgaruda.org/article.php?article=120253&val=5499&title=Menjadi%20Masyarakat%20Informasi).
- De Brí, F., & Bannister, F. (2010). Whole-of-government: The continuing problem of eliminating silos. *Proceedings of the European Conference on E-Government, ECEG*, 122–133
- Dipojono, H. K. Universitas Kelas Dunia dan Peningkatan Universitas Dunia (2015). <http://kopertis3.or.id/v2/wp-content/uploads/Materi-Prof-Hermawan-WCU.pdf>.
- Herawati, R. N. (2014). Penerapan e-Pemerintah Dalam Mendorong Terwujudnya Pengeyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik (Studi Kasus Kabupaten/kota Jawa Tengah). *Jurnal Ilmu Sosial*, 13(2). <https://media.neliti.com/media/publications/137065-ID-penerapan-e-Pemerintah-dalam-mendorong-t.pdf>.
- Iskandar, A. & A. S. (2017). Dinamika Lptk Menuju Perguruan Tinggi Kelas Dunia (World Class University/Wcu). *Perspektif Ilmu Pendidikan*, 31(1), 43. <https://doi.org/10.21009/PIP.311.6>.
- Kemenristekdikti. (2017). *Rencana Induk Riset Nasional Tahun 2017-2045* (28 Februari). Jakarta. Retrieved from [http://simlitabmas.ristekdikti.go.id/unduh/berkas/Rencana Induk Riset Nasional Tahun 2017-2045 - Edisi 28 Pebruari 2017.pdf](http://simlitabmas.ristekdikti.go.id/unduh/berkas/Rencana%20Induk%20Riset%20Nasional%20Tahun%202017-2045%20-%20Edisi%2028%20Februari%202017.pdf).
- Koran Sindo. (2018). Kementan Diminta Perbaiki Data Pangan demi Informasi Akurat soal Beras: Okezone Economy. <https://economy.okezone.com/read/2018/02/19/320/1861361/kementan-diminta-perbaiki-data-pangan-demi-informasi-akurat-soal-beras>. LAN. (2017). *Modul Pelatihan Dasar Calon PNS: Whole of Government*. <http://pusbindiklat.lipi.go.id/wp-content/uploads/Modul-Whole-Of-Government-Cetak.pdf>
- Masyhur, F. (2017). Penelitian e-Pemerintah di Indonesia: Studi Literatur Sistematis dari Perspektif Dimensi Peningkatan e-Pemerintah Indonesia (PeGI). *Jurnal IPTEK-KOM (Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Komunikasi)*, 19(1), 51–62.
- Mirmani, A. (2014). *Pengantar Kearsipan*. UT. <http://repository.ut.ac.id/4169/1/PUST2252-M1.pdf>

- Mulyadi. (2018). Efektivitas Sistem Kearsipan Dinamis (SIKD) Sebagai Sarana Temu Kembali Arsip Di Dinas Arsip, Perustakaan Dan Dokumentasi (ARPUSDOK) Kota Palembang. *JIPi*, 3(1), 50–73.
- Nahariyah, Y. N. (2016). Implementasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) Dalam Pengelolaan Arsip Dinamis Di Subbag Umum Dan Kepegawaian Bappeda Provinsi Jawa Tengah. <https://Media.Neliti.Com/Media/.../209142-Implementasi-Sistem-Informasi-Kearsipan.Do>.
- NARA. (2014). *Open Government Plan*. <https://www.archives.gov/files/open/open-government-plan-3.0.pdf>
- OECD. (2016). *Digital Government Strategies for Transforming Public Services In The Welfare Area*. <http://www.oecd.org/gov/digital-government/Digital-Government-Strategies-Welfare-Service.pdf>
- Ojo, A. (2012). *The Whole of Government Approach: Models and Tools for EGOV Strategy & Alignment*. Macao: United Nations University. <https://www.w3.org/egov/IG/slides/2012-03-20/Ojo-slides-v4.pdf>
- PEGS. (2017). *Architecture for delivering and-European e-Pemerintah services (Ver.1.0)*. ec.europa.eu/idabc/servlets/Doc2882.pdf?id=18944. <http://ec.europa.eu/idabc/servlets/Doc2882.pdf?id=18944>
- PresidenRI.go.id. (2016). Presiden: Urusan Data Pegangannya Hanya Satu, Data BPS | Presiden Republik Indonesia. <http://presidenri.go.id/berita-aktual/presiden-urusan-data-pegangannya-hanya-satu-data-bps.html>
- Sakowicz, M. (2003). How to Evaluate E-Pemerintah? Different Methodologies and Methods. *Eleventh NISPAcee Annual Conference*. <http://enos.itcollege.ee/~linnar/IT-ROI/UNPAN009486.pdf>
- The UK, G. of. (2000). Government Policy On Archives. *Journal of the Society of Archivists (2000) 21(1) 11-26, 21(1), 11-26*. http://www.nationalarchives.gov.uk/documents/government_policy.Pdf.
- TribunJakarta.com. (2018). Wajib Pajak Membludak, KPP Tangerang Pratama Timur Siapkan Delapan PC Tambahan. <http://jakarta.tribunnews.com/2018/03/29/wajib-pajak-membludak-kpp-tangerang-pratama-timur-siapkan-delapan-pc-tambahan>
- Tyasmara, N. C. (2016). Transformasi Masyarakat Informasi di Indonesia Ditinjau dari Aspek Budaya, Teknologi, Sosial dan Ekonomi. *Perpustakaan UI*.
- Wei Choo, C., Bergeron, P., Detlor, B., & Heaton, L. (2008). Information Culture and Information Use: An Exploratory Study of Three Organizations. *J. of The American Society for Information Science and Technology*, 59(5), 792–804. <https://doi.org/10.1002/asi.20797>.
- Yani, A. (2014). Manajemen Rekod Perguruan Tinggi (Suatu Tinjauan Literatur). https://www.researchgate.net/publication/236645575_Manajemen, (May 2013), 12–35.